

NOTULA

Pembahasan Piloting Tukar Peran *Account Representative* (AR) dan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak (JFPP)

A. Dasar

Surat Undangan Sekretaris Kelompok Kerja Bidang Organisasi dan SDM Nomor UND-5/PSAP.1/2022 tanggal 10 Januari 2022 Hal Pembahasan Piloting Tukar Peran *Account Representative* (AR) dan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak (JFPP).

B. Waktu dan Tempat

- Hari/ tanggal : Rabu/ 12 Januari 2022
- Pukul : 13.30 WIB s.d. selesai
- Tempat : Ruang Rapat Madya Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak Lantai 4, Gedung A1 Kantor Pusat DJP

C. Agenda

Pembahasan Piloting Tukar Peran *Account Representative* (AR) dan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak (JFPP)

D. Peserta/ Terundang

- Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak
- Sekretaris Direktorat Jenderal
- Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur
- Direktur Transformasi Proses Bisnis
- Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan
- Direktur Pemeriksaan dan Penagihan
- Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
- Kepala Bagian Perencanaan, Pengembangan, dan Pemberhentian Pegawai
- Kepala Subdirektorat Transformasi Organisasi
- Kepala Subdirektorat Pengembangan Manajemen Kepegawaian
- Kepala Subdirektorat Pengembangan Ekstensifikasi dan Penilaian
- Kepala Subdirektorat Kepatuhan dan Pengawasan Wajib Pajak
- Kepala Subdirektorat Teknik dan Pengendalian Pemeriksaan
- Kepala Subdirektorat Pengembangan Sistem Perpajakan
- Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi Informasi dan Pelaporan

E. Pelaksanaan Rapat

I. Pembukaan

Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak

- Pembahasan hari ini terkait desain umum piloting tukar peran *Account Representative* dan Jabatan Fungsional Pemeriksaan Pajak.

II. Pembahasan

o Kepala Subdirektorat Transformasi Organisasi

- Tim kecil sudah melakukan rapat sebanyak 2 kali untuk membahas konsep umum piloting.
- Untuk FPP menjadi AR, akan dilakukan di KPP Pratama di lingkungan DKI Jakarta dengan penggantian sejumlah Ketua Tim. Pertimbangan dilakukannya piloting di KPP Pratama adalah banyaknya tanggungan SPT LB di KPP Madya dan LTO
- Sudah diusulkan nama-nama aktor yang akan menjalani piloting.
- Para FPP akan berperan secara penuh secara AR, begitu juga sebaliknya.

- *Role* aplikasi serta *assignment* menjadi tugas dan tanggung jawab Direktorat TIK, para aktor tidak bisa lagi mengakses aplikasi lama.
 - Penentuan wilayah dan aktor memerlukan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
 - KPP dan aktor dipilih yang saldo tunggakan LB paling sedikit.
 - Ketua Tim dipilih yang masih di bawah 50 tahun.
 - Sasaran yang ingin dicapai: Ketua Tim FPP diharapkan dapat memahami proses bisnis pengawasan, membuat LHPt dengan menggunakan analisis proses bisnis, analisis SPT, analisis laporan keuangan, dan analisis transfer pricing serta dapat menguasai aplikasi Approweb.
 - *Output* yang diharapkan dari perpindahan FPP menjadi AR, antara lain: SP2DK yang berkualitas menggunakan analisis proses bisnis, analisis laporan keuangan, LHP2DK, pengawasan WP pada tahun berjalan, dan melakukan dinamisasi pembayaran Wajib Pajak pada tahun berjalan.
 - Untuk kriteria keberhasilan piloting, antara lain: kualitas *output* yang dihasilkan, peningkatan kinerja pegawai, serta inventarisasi kendala yang ditemui selama masa piloting.
 - Nama-nama aktor FPP yang akan berpindah beserta kantornya sudah dipilih oleh Direktorat P2 dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang sebelumnya disebutkan.
 - Terkait perpindahan AR menjadi FPP, tim kecil lebih memilih opsi ketiga dengan menjadikan AR *secondment* sebagai Tenaga Ahli Pemeriksaan.
 - AR dapat melaksanakan pemeriksaan tetapi sebagai pendamping, sehingga tidak ada isu legalitas.
 - Parameter penentuan AR peserta piloting, antara lain: AR junior di Seksi Was 1 dan AR junior dengan jumlah SP2DK dan realisasi SP2DK yang paling sedikit.
 - Untuk parameter evaluasi, ditentukan 3 hal: kemampuan melaksanakan tata cara pemeriksaan, standar pemeriksaan dan komunikasi kepada Wajib Pajak saat pemeriksaan lapangan.
 - Kriteria keberhasilan piloting bagi AR yang berpindah antara lain: penambahan pengalaman AR (masih perlu dipertimbangkan apakah perlu dilakukan survei atas pemahaman yang diperoleh), dan inventarisasi kendala yang dihadapi serta penilaian supervisor.
 - Akan diberikan relaksasi IKU bagi para aktor.
 - Aktor yang terlibat akan dibebastugaskan dari program PPS.
 - Kegiatan piloting rencananya akan dilaksanakan mulai bulan Maret dengan jangka waktu 3 bulan, dan diharapkan dapat memberikan penambahan pengalaman bagi AR dalam melaksanakan probis pemeriksaan.
 - Nama-nama aktor AR yang akan berpindah beserta kantornya sudah dipilih oleh Direktorat PKP dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang sebelumnya disebutkan
- **Kepala Subdirektorat Teknik dan Pengendalian Pemeriksaan**
 - Sudah dilakukan rapat dengan tim kecil dan dilanjutkan rapat internal di Direktorat P2, dilakukan filter untuk menyaring KPP yang memiliki saldo LB sedikit.
 - Dari data yang sudah diolah, diperoleh 2 KPP tiap Kanwil, dan dicocokkan dengan data AR yang akan dipertukarkan dari Direktorat PKP.
 - **Kepala Subdirektorat Kepatuhan dan Pengawasan Wajib Pajak**
 - Usulan unit kerja sasaran piloting berdasarkan kriteria *success rate* PKM yang rendah dan LHPt komprehensif yang relatif rendah.
 - Pemilihan aktor, dipilih AR junior dilihat dari TMT.

- Konsep jangka waktu pelaksanaan di triwulan 1 (Februari – Maret) atau triwulan 2 (April – Juni), dengan pertimbangan penyesuaian dengan DPP yang dibuat.
 - Pengukuran kinerja menggunakan efektivitas dan tingkat penyelesaian SP2DK menjadi LHP2DK serta *success rate* (kompetensi awal dibandingkan dengan kompetensi setelah menjadi fungsional)
 - IKU individu akan disesuaikan melalui pengurangan target individu AR, pengaturan realisasi kerja P4DK, penyesuaian hasil piloting dengan capaian IKU setara IKU eksis.
- **Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak**
 - *Concern* mengenai penerimaan di KPP agar tidak terganggu.
 - Harus ada pembanding bagi FPP dan AR untuk mengukur kinerja selama piloting.
 - Setuju jika para aktor dibebastugaskan dari tugas lamanya agar terfokus pada kegiatan piloting.
- **Sekretaris Direktur Jenderal Pajak**
 - Alternatif yang dipilih oleh tim perumus dianggap sudah yang terbaik untuk saat ini dengan pertimbangan tidak melanggar aturan formal yang ada.
 - Harus dikomunikasikan kepada pimpinan unit piloting agar tidak terjadi perbedaan persepsi di lapangan.
 - Tujuan sebenarnya yang ingin dicapai adalah sejauh mana kualitas SP2DK yang diterbitkan, apakah dari sampling tersebut dapat mewakili.
 - Meskipun sudah dimaksimalkan untuk mengurangi pengorbanan, pengorbanan tetap harus ada.
 - Piloting diharapkan dapat dilakukan lebih cepat, dapat dimulai pada bulan Februari.
 - Ada anggapan bahwa pemeriksa dianggap lebih ahli, sehingga dengan pertukaran ini diharapkan hasil pengawasan akan lebih baik.
- **Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur**
 - Ketika memasuki kondisi *to be*, semua sub-rumpun dapat dilakukan pertukaran dengan tetap melihat kompetensi.
 - Apabila *account representative* di-improve dengan kompetensi pemeriksa, lebih cepat dilakukan maka lebih baik. Untuk masalah *grading* juga secepatnya harus disesuaikan.
- **Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan**
 - Direktorat PKP akan secara penuh mendukung kegiatan piloting.
 - Piloting akan menggunakan DPP yang diperbarui setiap 3 bulan, diusulkan agar dimulai di bulan April sehingga DPP sebelumnya dihabiskan terlebih dahulu.
 - Dampak dari piloting bukan merupakan tujuan utama, tetapi tujuannya adalah perubahan fungsi dari AR.
- **Direktur Teknologi Informasi Komunikasi**
 - Arahan Bapak Direktur Jenderal agar piloting dilaksanakan di semua level KPP mulai dari KPP WP Besar, Khusus, Madya, dan Pratama.
- **Direktur Transformasi Proses Bisnis**
 - Tidak ada masalah terkait opsi yang dipilih, tetapi nantinya tetap perlu diadakan pelatihan bagi para pegawai.
 - Perlu diperhatikan efek implikasinya, rata-rata anggapan yang beredar, pola mutasi fungsional dihindari.

- Perlu diadakan sosialisasi atau kampanye terkait program piloting oleh Direktorat P2Humas.
- **Direktur Pemeriksaan dan Penagihan**
 - KPP Pratama yang akan dipilih diutamakan adalah KPP Pratama yang memiliki potensi besar. Semakin besar potensinya, maka FPP yang ditukar akan lebih banyak.
 - KPP Madya yang dipilih adalah KPP Madya baru, karena secara potensi tidak jauh dengan KPP Pratama berpotensi besar, sehingga ketika proses pertukaran tidak terlalu susah.
 - Apabila kantor sasaran sudah ditetapkan, maka isu utamanya adalah memilih aktor yang akan mengikuti piloting.
 - AR yang akan dipilih adalah AR yang dianggap perlu untuk menambah kompetensi di bidang pemeriksaan.
 - Apabila Ketua Tim FPP mengerjakan LHPT, SP2DK, dan LHP2DK, diharapkan hasilnya lebih berkualitas. LHP2DK yang berkualitas merupakan bahan baku yang bagus untuk pemeriksaan.
 - Waktu mulai piloting diutamakan di bulan April s.d. Juni, karena masih sibuk dengan SPT LB.
 - Setuju untuk *fully dedicated* berperan sebagai AR, tidak paralel mengerjakan tugas lama dan para aktor akan diberikan relaksasi IKU.
- **Sekretaris Direktorat Jenderal**
 - Piloting akan dilakukan di bulan Februari.
 - Hanya 1 seksi yang akan dilakukan piloting pada KPP Madya, lokasi KPP Madya akan ditentukan kemudian.

III. Simpulan

- Akan dilakukan relaksasi IKU terkait dengan kegiatan piloting.
- Menambah KPP Madya, Khusus, dan Wajib Pajak Besar sesuai dengan arahan Direktur Jenderal. Unit sasaran akan ditentukan melalui rapat lanjutan antara tim kecil.
- Pengukuran kinerja dan keberhasilan akan dilihat dari kompetensi para aktor.
- Risiko-risiko yang berpotensi timbul akan dilaporkan kepada pimpinan.

Mengetahui,
Sekretaris (Kelompok Kerja
Bidang Organisasi dan Sumber
Daya Manusia)



Ditandatangani secara elektronik
Untung Supardi

Dibuat di Jakarta
 Pada tanggal 28 Januari 2021
 Notulis

ttd.

Rachman Rian Prasetyo

